



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2020

KATA PENGANTAR

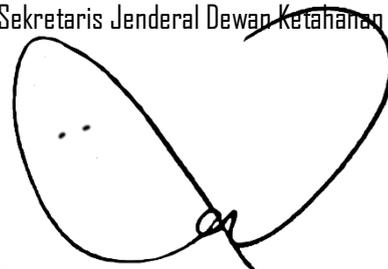
Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh....

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua....

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan Kinerja Setjen Wantannas tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari periode Rencana Strategis (Renstra) Setjen Wantannas tahun 2020-2024. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Setjen Wantannas tahun 2020.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Setjen Wantannas selama tahun 2020. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan di tahun mendatang. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan kinerja Setjen Wantannas tahun 2020.

Jakarta, Februari 2021
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional



Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.
Laksamana Madya TNI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2021
Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi,
dan Pengawasan Internal



Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr. (Han)
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR ISI

2	Kata Pengantar	7	BAB I Pendahuluan
3	Penyataan Telah Direviu	8	Tugas dan Fungsi
4	Daftar Isi	8	Isu-Isu Strategis dan Permasalahan
5	Daftar Tabel	9	Sumber Daya Manusia
5	Daftar Grafik	13	Sumber Dana
6	Ikhtisar Eksekutif	14	Dasar Hukum
18	BAB III Akuntabilitas Kinerja	15	BAB II Perencanaan Kinerja
19	A Capaian Kinerja	16	Visi, Misi, dan Tujuan
19	Terbinanya Kondisi Ketahanan Nasional dalam Rangka Menjamin Keselamatan, Kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara dari Ancaman Kedaulatan, Persatuan, dan Kesatuan	17	Kebijakan dan Program
21	Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	32	BAB IV Penutup
30	B Realisasi Anggaran	33	Permasalahan
		34	Perbaikan ke Depan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 SDM Berdasarkan Unit Kerja Eselon I/II.....	10
Tabel 1.2 Daftar Jabatan yang Kosong.....	10
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2020	17
Tabel 3.1 Indeks Ketahanan Nasional	20
Tabel 3.2 Capaian Saran Tindak 2015-2020.....	21
Tabel 3.3 Perhitungan Indeks Kesehatan Organisasi.....	22
Tabel 3.4 Indeks Kesehatan Organisasi.....	23
Tabel 3.5 Capaian Pendidikan dan Pelatihan Teknis	23
Tabel 3.6 Nilai Kinerja Aspek Implementasi Tahun 2018-2020.....	26
Tabel 3.7 Persentase Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja 2020	27
Tabel 3.9 Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	28
Tabel 3.10 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 SDM Berdasarkan Golongan/Ruang.....	11
Grafik 1.2 SDM Berdasarkan Pendidikan	11
Grafik 1.3 Struktur Organisasi Setjen Wantannas.....	12
Grafik 3.1 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	31
Grafik 3.2 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.....	31
Grafik 4.1 Capaian Sasaran Strategis Setjen Wantannas	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah menetapkan perencanaan strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Setjen Wantannas periode 2020-2024. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2020 tersebut, Setjen Wantannas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perumus rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia telah menghasilkan saran tindak kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dalam menyiapkan pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang *defence, security, crisis prevention* dan *resolution* serta arahan-arahan lain dari Presiden dalam merespon dinamika kehidupan nasional.

Dokumen saran tindak tersebut, dihasilkan melalui serangkaian kegiatan perumusan kebijakan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan dalam koridor 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020, yaitu:

- (1) Terwujudnya kondisi ketahanan dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan; dan
- (2) Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
SS1	Indeks Ketahanan Nasional	84	105.47
SS2	Indeks Kesehatan Organisasi	84	83.3

Secara umum Setjen Wantannas tahun 2020 telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Namun demikian, dari seluruh target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 masih terdapat beberapa target yang belum dicapai dikarenakan program kegiatan Setjen Wantannas masih berjalan sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian tersebut mengalami peningkatan kualitas.

BAB I

PENDAHULUAN

Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dibentuk pada tahun 1999, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional.

Tugas

Merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional.

Fungsi

1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan
3. Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Isu-Isu Strategis

- Terdapat 7 (tujuh) isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Setjen Wantannas yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa mendatang, yaitu:
1. Pembinaan ketahanan nasional belum terukur;
 2. Belum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional;
 3. Keppres 101 tahun 1999 tentang Wantannas dan Setjen Wantannas sudah tidak relevan;
 4. Manajemen kinerja yang belum optimal;
 5. Belum terealisasinya pelaksanaan Sidang Dewan; dan
 6. Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas.

Permasalahan

1. Terbatasnya anggaran Setjen Wantannas;
2. Penyelenggaraan kegiatan terhambat pandemi covid-19;
3. Belum maksimalnya persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti; dan
4. Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme pegawai masih harus ditingkatkan.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat berperan penting terhadap kelancaran operasional suatu organisasi. Demikian pula SDM yang dimiliki oleh organisasi Setjen Wantannas. Pada akhir tahun 2020, Setjen Wantannas mencatat jumlah pegawai yang dikelolanya telah mencapai 150 pegawai, yang terdiri dari 140 pegawai adalah PNS/TNI/POLRI, dan 10 pegawai dipekerjakan. Berikut ini dijelaskan profil singkat SDM Setjen Wantannas yang berhasil dihimpun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

1. SDM Setjen Wantannas Berdasarkan Golongan dan Ruang

SDM Setjen Wantannas terdiri dari 85 orang merupakan PNS dan 55 orang dari personel TNI/POLRI. Untuk komposisi PNS, pegawai Setjen Wantannas dibagi berdasarkan golongan dan ruang memiliki 13 pegawai yang berada pada Golongan II dan 63 pegawai berada pada Golongan III. Sementara itu, jumlah pegawai yang berada di Golongan IV sebanyak 9 pegawai dan terdapat pula 10 pegawai dipekerjakan. Sedangkan untuk komposisi TNI/POLRI terdiri dari 49 pegawai merupakan personel TNI dan 6 pegawai dari personel POLRI. Di dalam Figur 2.1 dapat dilihat bahwa kelompok karakteristik pegawai berdasarkan golongan dan ruang yang paling banyak adalah pegawai dari personel TNI yang berjumlah 49 pegawai (32,67%), diikuti dengan Golongan/Ruang III/a sebanyak 33 pegawai (22%), dan kemudian 12 pegawai yang merupakan pegawai dengan Golongan/Ruang III/c (8%).

2. SDM Setjen Wantannas Berdasarkan Jenjang Pendidikan

SDM Setjen Wantannas juga diperkuat dengan keragaman tingkat pendidikan yang dimiliki setiap pegawai (lihat Figur 2.2). Sampai dengan tahun 2020, pegawai yang menempuh

Pendidikan Doktoral (S3) sebanyak 9 pegawai (6%). Sedangkan yang telah menempuh Pendidikan Magister (S2) dan Sarjana (S1) masing-masing sebanyak 38 pegawai (25%) dan 57 pegawai (38%), serta terdapat 46 pegawai yang berlatar belakang Non Sarjana (Non S1).

3. SDM Setjen Wantannas Berdasarkan Jenis Kelamin

SDM Setjen Wantannas juga memberikan peluang kerja antara laki-laki dan perempuan. Meskipun komposisi antara keduanya belum berimbang, namun Setjen Wantannas tidak menutup kemungkinan untuk posisi strategis juga diisi oleh wanita. SDM Setjen Wantannas berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 117 pegawai laki-laki (78%) dan 33 pegawai perempuan (22%).

4. SDM Setjen Wantannas Berdasarkan Unit Kerja Eselon I/II

Sebagai penutup dari penjelasan profil singkat SDM Setjen Wantannas, total 150 pegawai Setjen Wantannas yang ada tersebar pada 4 unit kerja kedeputian, 5 Staf Ahli, dan 3 unit kerja kebiroan. (lihat Tabel 2.1 dan 2.2) Berikut diuraikan pula beberapa jabatan yang mengalami kekosongan.

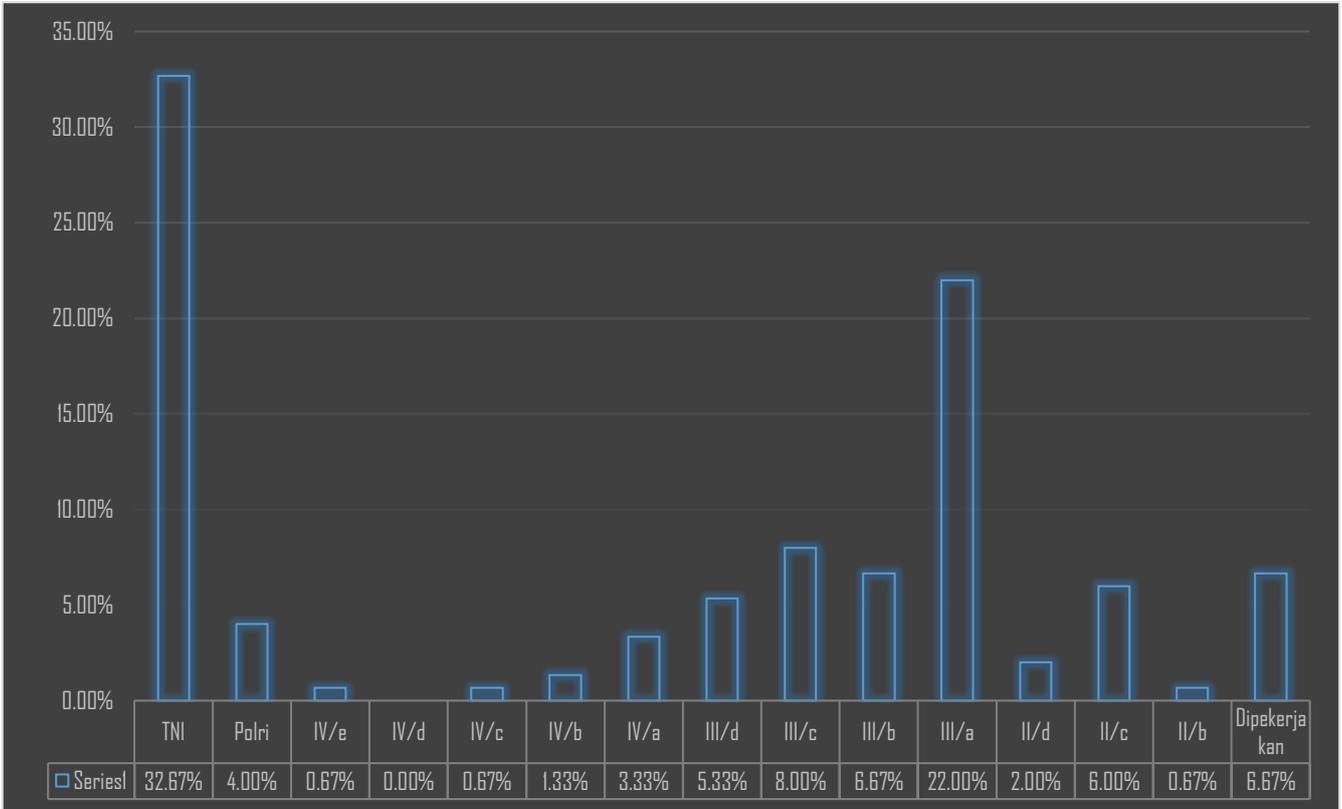
Tabel 1.1
SDM Berdasarkan Unit Kerja Eselon I/II

Deputi Sisnas	13
Deputi Polstra	12
Deputi Jiandra	13
Deputi Pengembangan	13
Staf Ahli	5
Biro POK	27
Biro PSP	22
Biro Umum	44

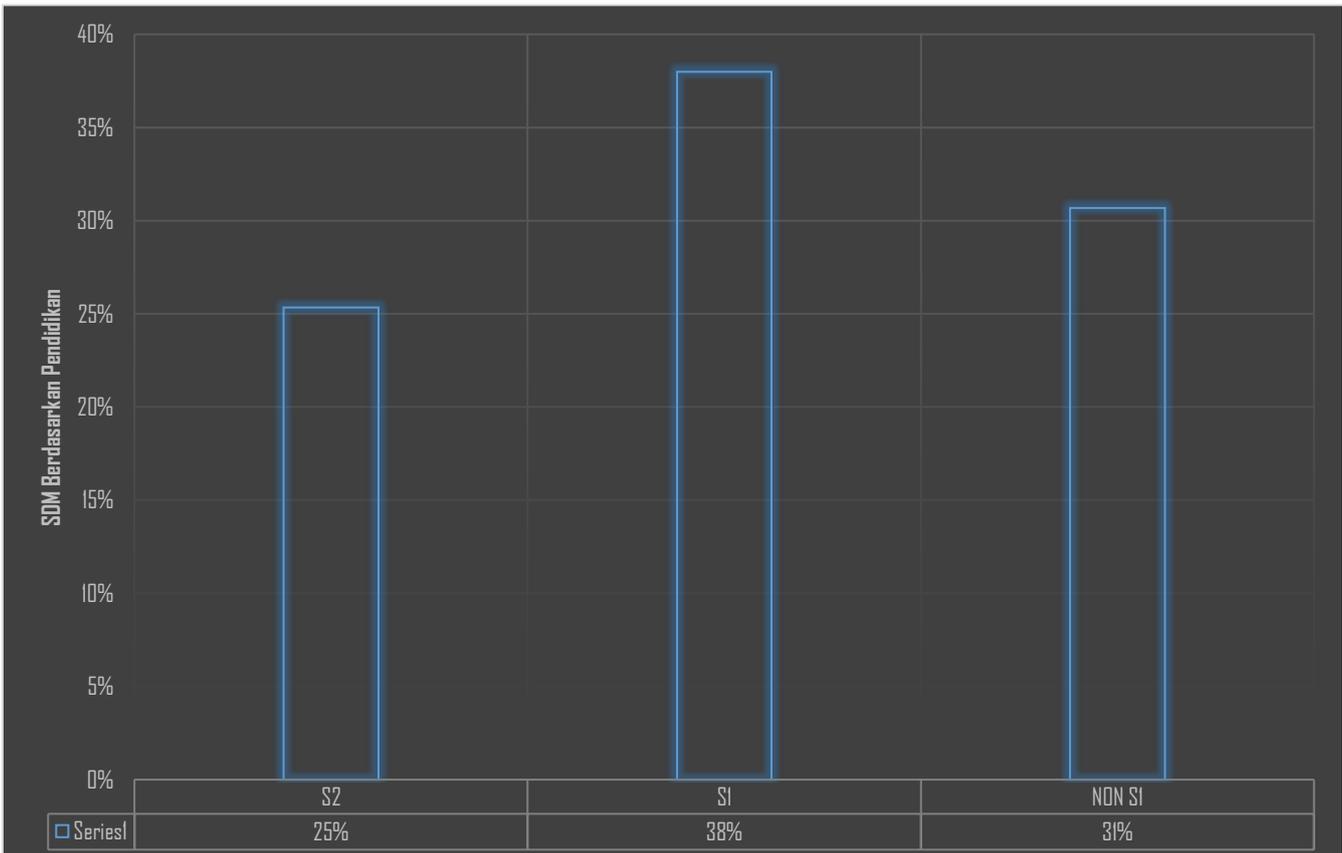
Tabel 1.2
Daftar Jabatan yang Kosong

No	Unit Kerja	Jabatan
1	Deputi Sistem Nasional	Analisis Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Sarana Prasarana
2		Analisis Kebijakan Bidang Pullah Info
3		Analisis Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi
4	Deputi Politik dan Strategi	Analisis Kebijakan Bidang Rencana Kontinjensi Sosial Budaya
5	Deputi Pengembangan	Analisis Kebijakan Bidang Keagamaan
6		Analisis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial
7		Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Perundang-undangan
8		Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Pendidikan
9	Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal	Koordinator Kelompok Persidangan dan Humas
10		Sub Kelompok Hubungan Antar Lembaga
11		Kelompok Persidangan dan Humas
12		Sub Kelompok TU Kelompok Pengawasan Internal
13	Biro Umum	Sub Koordinator Kelompok Pelayanan Persidangan Kelompok Persidangan dan Humas
14		Sub Kelompok TU Sahli Kelompok TU dan Protokol
15	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	Kasubbag TU Sesjen Kelompok TU dan Protokol
		Sub Kelompok Tata Laksana Kelompok Organisasi dan Tata Laksana

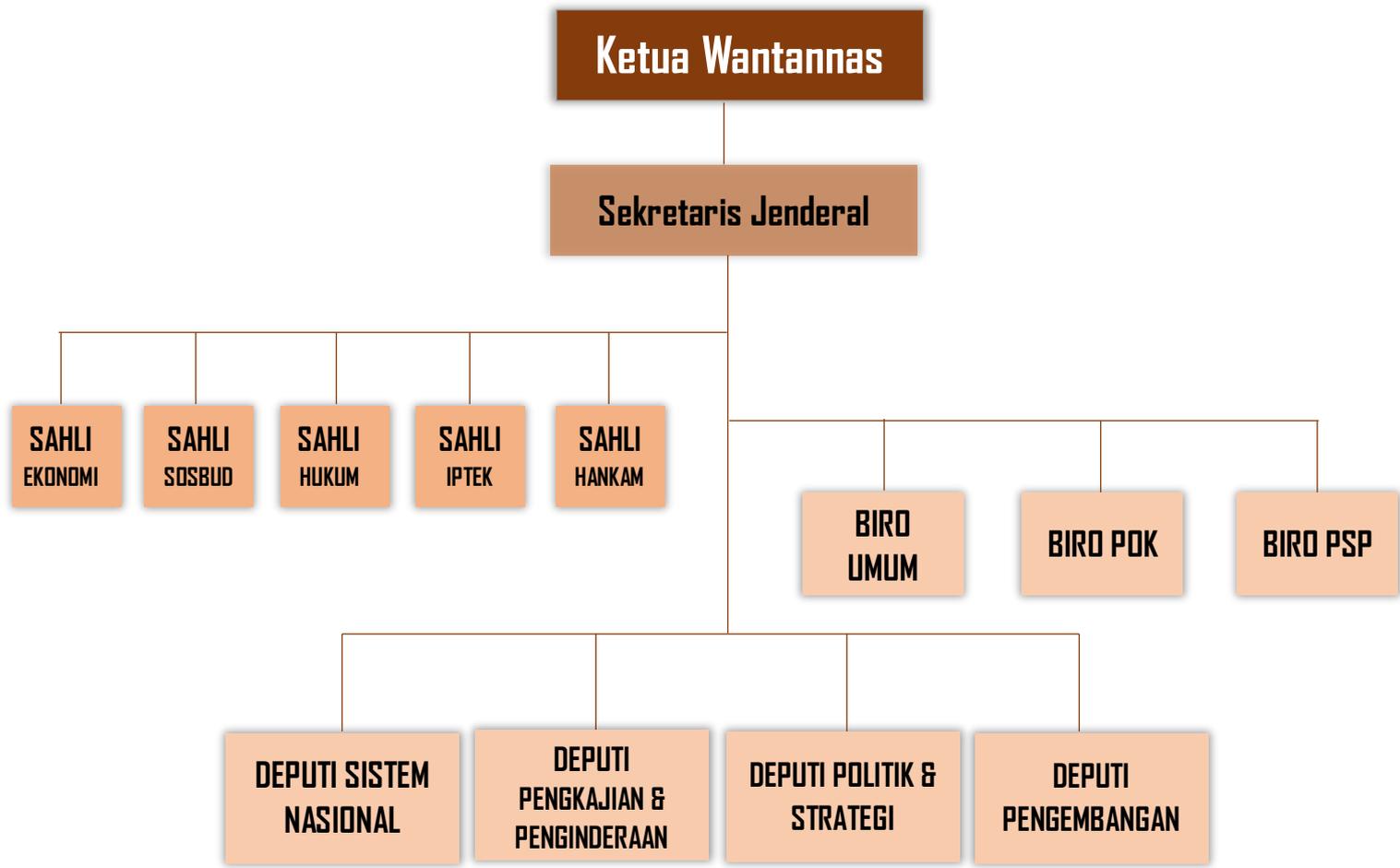
Grafik 1.1
SDM Berdasarkan Golongan/Ruang



Grafik 1.2
SDM Berdasarkan Pendidikan



Grafik 1.3
Struktur Organisasi Setjen Wantannas



SUMBER DANA

Pada tahun 2020, Setjen Wantannas memperoleh pagu alokasi awal sebesar Rp.46.769.195.000. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA.2020 untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, maka Setjen Wantannas melakukan *Refocusing* anggaran sebesar Rp.483.365.000,- sehingga menjadi Rp.46.285.830.000,-. Pada bulan Juni, Setjen Wantannas mengajukan permintaan tambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.2.765.422.000,- untuk kekurangan belanja pegawai, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-127/MK.2/2020 tanggal 20 Juni 2020, sehingga anggaran Setjen Wantannas sebesar Rp.49.051.252.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp.45.884.008.145,- atau 93,54%. Realisasi anggaran Setjen Wantannas Tahun Anggaran 2020 dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan Jenis Program

- a. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya** dengan anggaran sebesar Rp.39.804.133.000,- terealisasi sebesar Rp.36.923.987.298,- atau 92,76%.
- b. **Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional** dengan anggaran sebesar Rp.9.247.119.000,-, terealisasi sebesar Rp.8.960.020.847,- atau 96,90%.

Berdasarkan Jenis Belanja

- a. **Belanja Pegawai** dengan anggaran sebesar Rp.27.073.906.000,- terealisasi sebesar Rp.24.739.083.240,- atau 91,38%.
- b. **Belanja Modal** dengan anggaran sebesar Rp.40.408.000,- terealisasi sebesar Rp.40.408.000,- atau 100%.
- c. **Belanja Barang** dengan anggaran sebesar Rp.21.936.938.000,- terealisasi sebesar Rp.21.104.516.905,- atau 96,21%.

Berdasarkan Jenis Kegiatan

- a. **Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan** dengan anggaran sebesar Rp.28.044.860.000,- terealisasi sebesar Rp.25.675.910.446,- atau 91,55%.
- b. **Pengelolaan Persidangan dan Humas** dengan anggaran sebesar Rp.757.210.000,- terealisasi sebesar Rp.743.799.887,- atau 98,23%.
- c. **Pengelolaan Internal Perkantoran dan Kepegawaian** dengan anggaran sebesar Rp.11.002.063.000,- terealisasi sebesar Rp.10.504.276.965,- atau 95,48%.
- d. **Perumusan Kebijakan Sistem Nasional** dengan anggaran sebesar Rp.2.262.677.000,- terealisasi sebesar Rp.2.179.547.005,- atau 96,33%.
- e. **Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Nasional** dengan anggaran sebesar Rp.2.155.916.000,- terealisasi sebesar Rp.2.096.597.778,- atau 97,25%.
- f. **Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman** dengan anggaran sebesar Rp.2.129.806.000,- terealisasi sebesar Rp.2.063.333.026,- atau 96,88%.

- g. Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan** dengan anggaran sebesar Rp.2.248.256.000,- terealisasi sebesar Rp.2.181.098.038,- atau 97,01%.
- h. Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu** dengan anggaran sebesar Rp.159.300.000,- terealisasi sebesar Rp.157.599.000,- atau 98,93%.
- i. Aksi Bela Negara** dengan anggaran sebesar Rp.291.164.000,- terealisasi Rp.281.846.000,- atau 96,80%.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Bela Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
10. Surat Pengesahan DIPA Petikan Setjen Wantannas Nomor: SP DIPA- 052.01.1.427975/2020 tanggal 12 November 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Visi

“Wantannas yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi

Wantannas mempunyai dua misi untuk mendukung visi tersebut, yaitu:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara; dan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana lembaga Wantannas.

Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya kondisi nasional dalam rangka menjamin keselamatan, keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam ancaman kedaulatan, persatuan, dan kesatuan.	Terbinanya kondisi nasional dalam rangka menjamin keselamatan, keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam ancaman kedaulatan, persatuan, dan kesatuan.	Indeks Ketahanan Nasional
2	Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.	Terwujudnya organisasi kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.	Indeks Kesehatan Organisasi

Kebijakan

- a. Meningkatnya kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional;
- b. Meningkatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional; dan
- c. Menguatnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

Program

- a. Program Utama (Prioritas)

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas prioritas Setjen Wantannas yang dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi perumusan kebijakan ketahanan nasional. Program ini berjumlah 1 (satu) program, yaitu : Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.

- b. Program Pendukung (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Setjen Wantannas khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek perencanaan, keuangan, persidangan, humas, kepegawaian, kerumahtanggaan dan administrasi umum. Program ini berjumlah 1 (satu) program, yaitu : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan	Indeks ketahanan nasional (bobot 100)	84	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional
2	Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks kesehatan organisasi (bobot 100)	84	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pengukuran capaian kinerja Setjen Wantannas dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Sejalan dengan hal tersebut, Setjen Wantannas sepanjang tahun 2020 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sasaran dan indikator capaiannya sebagai berikut:

SS 1: Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan

Sasaran strategis ini dicapai dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Nasional.



Indeks Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhannas RI, 2008). Ketahanan nasional dapat digolongkan menjadi delapan gatra, meliputi gatra geografi, demografi dan sumber kekayaan alam sebagai gatra alamiah (*natural determinants*) serta gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan sebagai gatra sosial (*social determinants*). Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan diukur dengan menggunakan Indeks Ketahanan Nasional. Sesuai dengan indikator tersebut, Setjen Wantannas telah menghasilkan saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang *defence, security, crisis prevention and resolution* secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden RI), dan telah mendapatkan respon Presiden berupa disposisi kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Naskah saran tindak kebijakan ketahanan nasional dimaksud adalah naskah yang bersifat siklis, dinamis, dan perkiraan cepat. Dalam mengukur kinerja, Setjen Wantannas menggunakan Indeks Ketahanan Nasional. Indeks Ketahanan Nasional yang merupakan gambaran pencapaian kinerja Wantannas berdasarkan analisis hasil pencapaian sasaran program pengembangan kebijakan ketahanan nasional.

Tabel 3.1
Indeks Ketahanan Nasional

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Nasional	84	105.47	125.55%

Indeks Ketahanan Nasional Setjen Wantannas diukur dari rata-rata persentase jumlah produk saran tindak kebijakan pembinaan ketahanan nasional yang ditindaklanjuti, dengan formula sebagai berikut:

$$IKN = \frac{\text{Jumlah saran tindak kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target saran tindak yang ditindaklanjuti}} \times 100$$

$$IKN = \frac{77 \text{ saran tindak kebijakan}}{73 \text{ saran tindak kebijakan}} \times 100$$

$$IKN = 105.47$$

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Strategis Setjen Wantannas 2020-2024. Setjen Wantannas telah menghasilkan 78 naskah kajian dari 73 naskah kajian yang telah ditetapkan atau tercapai 106.8%. Tujuh puluh delapan naskah yang dihasilkan, terdapat 1 naskah yang tidak dikirim ke Presiden. Naskah siklis yang dihasilkan pada tahun 2020 terdiri dari Rencana Kontijensi, Apresiasi Strategi Nasional (Apstranas) 2021 dan Perkiraan Strategi Nasional (Kistranas) 2021. Naskah kajian yang bersifat siklis dan dinamis selama tahun 2020 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses perumusan, yaitu:



Saran tindak kebijakan yang ditindaklanjuti merupakan saran tindak dan saran kebijakan yang disampaikan Setjen Wantannas kepada Presiden sebagian didisposisikan ke K/L terkait untuk ditindaklanjuti, dan sebagian lainnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan kenegaraan. Indeks ketahanan nasional tahun 2020 ditargetkan sebesar 84 (bobot) atau dapat terpenuhi dengan 62 saran tindak kebijakan yang ditindaklanjuti. Tahun 2020, saran tindak kebijakan yang ditindaklanjuti sebanyak 77 saran tindak kebijakan atau 105.47 (bobot).

Tabel 3.2
Capaian Saran Tindak 2015-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	132	132	100.00%
2016	163	165	101.23%
2017	199	167	83.92%
2018	97	97	100.00%
2019	97	97	100.00%
2020	73	78	106.84%
Total	761	736	96.71%

Ketercapaian atas target sasaran program tahun 2020 tidak terlepas dari kegiatan – kegiatan yang mendukungnya, yaitu:

1. Menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan dan strategi sistem nasional;
2. Menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan politik dan strategi nasional;
3. Menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman;
4. Menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan evaluasi implementasi dan risiko pembangunan.

SS 2: Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien

Sasaran strategis ini dicapai dengan satu indikato kinerja yaitu Indeks Kesehatan Organisasi.



Indeks Kesehatan Organisasi

Kesehatan organisasi adalah kemampuan organisasi untuk menyelaraskan, mengeksekusi, dan memperbaharui dirinya lebih cepat dari organisasi lain di bidangnya sehingga dapat mempertahankan kinerja yang tinggi dalam jangka panjang. Sumber daya sebagai penggerak organisasi tentu memiliki peranan penting dalam menunjang kinerja. Dengan keterbatasan ketersediaan sumber daya baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya, maka Setjen Wantannas harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Indeks kesehatan organisasi bersumber dari hasil capaian kinerja organisasi.

Tabel 3.3
Perhitungan Indeks Kesehatan Organisasi

Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (ISP)	Target Indikator Sasaran Program (TISP)	Realisasi Indikator Sasaran Program (RISP)	Persentase Realisasi Indikator Sasaran Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas	Tersedianya SDM Setjen Wantannas yang kompeten dan profesional	Persentase pegawai yang lulus dari pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis dengan predikat baik.	100	100	100
		Nilai kesenjangan kompetensi Pejabat Eselon I dan Eselon II	80	40	125
		Nilai kompetensi dan integritas	80	91.27	114.3
	Terkelolanya anggaran Setjen Wantannas secara optimal dan akuntabel	Opini BPK atas LK Wantannas	WTP	WTP	100
		Nilai efisiensi anggaran Wantannas	95	94.92	99.9
		Persentase penyerapan DIPA	100	93.54	93.6
	Terwujudnya birokrasi Setjen Wantannas yang efektif dan efisien	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Wantannas	4 atau setara B	B	100
		Nilai penerapan RB Setjen Wantannas	B	B	100
	Tersedianya informasi yang valid, andal dan mudah diakses di Setjen Wantannas	Persepsi user terhadap kemudahan akses	4	-	-
		Tingkat kematangan pengelolaan data dan informasi	4	-	-

Tabel 3.4
Indeks Kesehatan Organisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesehatan Organisasi	84	83.3	99.16%

Sebagaimana Tabel di atas, hasil pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan kedua Setjen Wantannas telah merealisasikan hasil capaian berdasarkan target rencana dalam penetapan kinerja tahun 2019. Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja dari sasaran dan tujuan kedua untuk masing-masing sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM Setjen Wantannas yang kompeten dan profesional

Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan aset terpenting dalam organisasi. SDM meliputi manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personel, tenaga kerja, pegawai atau karyawan), potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, serta potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Capaian atas SDM Setjen Wantannas yang kompeten dan profesional diukur dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran Program, yaitu:

a. Persentase pegawai yang lulus dari pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis dengan predikat baik.

Adapun perhitungan untuk pegawai yang lulus adalah sebagai berikut:

$$PPPB = \frac{\sum PPB}{\sum PMP} \times 100\%$$

Keterangan:

- PPPB: Persentase pegawai yang lulus dari pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis dengan predikat baik.
- PPB: Pegawai yang lulus dari pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis dengan predikat baik.
- PMP: Pegawai yang mengikuti pelatihan.

Tabel 3.5
Capaian Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No	Nama Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Diklat Pembentukan Auditor	3	3	100%
2	Diklat Manajemen Pengawasan	2	2	100%
3	Diklat Perancang Perundang-Undangan	2	2	100%
4	Diklat SAP Berbasis Akrual	1	1	100%
5	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Vital	2	2	100%

6	Diklat Teknis Kepegawaian	2	2	100%
7	Diklat Kelas Online-Mahir Presentasi	10	10	100%
8	Diklat Bimtek IT Web Development	1	1	100%

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 Setjen Wantannas telah merealisasikan Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebanyak 8 diklat. Dengan capaian tersebut, maka persentase kelulusan atas pendidikan dan pelatihan mencapai 100%.

b. Nilai Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon I dan II

Nilai Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Setjen Wantannas dihitung dengan cara membandingkan selisih antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang dibutuhkan dibagi kompetensi yang dibutuhkan. Berdasarkan data pada tahun 2019, di lingkungan Setjen Wantannas terdapat 59 pejabat eselon I dan II, dengan rincian 10 pejabat eselon I dan 49 pejabat eselon II. Terdapat 3 aspek yang menjadi syarat yang harus dimiliki oleh pejabat eselon I dan II, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (bobot 15);
2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 20jp (bobot 15); dan
3. Seminar (bobot 10).

Adapun perhitungan yang digunakan dalam mengukur persentase kesenjangan kompetensi pejabat Eselon I dan II menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$KK = \frac{\Sigma \text{nilai kompetensi pejabat eselon I dan II}}{\Sigma \text{pejabat eselon I dan II}}$$

$$KK = \frac{2360}{59}$$

$$KK = 40$$

Dari perhitungan di atas, bahwa nilai 40 mengindikasikan tidak ada kesenjangan kompetensi pejabat eselon I dan II. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan pejabat di lingkungan Setjen Wantannas semakin tepat dan sesuai dengan kompetensinya. Hasil penilaian kompetensi tersebut dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (baperjakat) dalam pelaksanaan mutasi dan promosi di lingkungan Setjen Wantannas.

c. Nilai Kompetensi dan Integritas

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi sering digunakan sebagai kriteria utama untuk menentukan kerja pegawai seperti profesional. Sebuah instansi akan mempromosikan pegawai yang memenuhi kriteria kompetensi yang dibutuhkan dan dipersyaratkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kompetensi dapat juga digunakan sebagai kriteria untuk menentukan penempatan kerja pegawai. Pegawai

yang ditempatkan pada tugas tertentu akan mengetahui kompetensi apa yang diperlukan, serta jalan yang harus ditempuh untuk mencapainya dengan mengevaluasi kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan tolok ukur penilaian kinerja. Integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma. Dalam pengukuran nilai kompetensi dan integritas pegawai Setjen Wantannas dengan formula dari agregasi 3 variabel yaitu:

1. Rata-rata nilai SKP pegawai Setjen Wantannas (SKP);
2. Persentase kehadiran pegawai Setjen Wantannas (Kehadiran); dan
3. Persentase Pegawai Setjen Wantannas yang melaporkan LHKASN/LHKPN (LHKASN/LHKPN).

$$KI = \frac{\Sigma SKP + Kehadiran + LHKASN/LHKPN}{3}$$

$$KK = \frac{87 + 89.81 + 97.01}{3}$$

$$KK = 91.27$$

Dari hasil perhitungan di atas, didapatkan nilai kompetensi dan integritas Setjen Wantannas sebesar 91,27. Nilai ini menggambarkan ketersediaan pegawai ASN yang kompeten dan berintegritas di lingkungan Setjen Wantannas.

2. Terkelolanya anggaran Setjen Wantannas secara optimal dan akuntabel

Pemerintah pusat dan daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan. Setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR/DPRD. Dalam menguji laporan pertanggungjawaban diperlukan pihak yang kompeten dan independen. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Capaian atas anggaran Setjen Wantannas yang optimal dan akuntabel diukur dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran Program, yaitu:

a. Opini BPK atas LK Wantannas

Salah satu indikator keberhasilan suatu kelembagaan dalam peningkatan kualitas sumber daya organisasi adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Setjen Wantannas berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK Tahun 2020 masih berlangsung sehingga belum diketahui hasilnya sampai dengan disahkannya laporan ini. Prestasi Setjen Wantannas sebagai lembaga yang meraih opini WTP selama 13 (tigabelas) tahun berturut-turut yaitu Laporan Keuangan 2007 s.d Laporan Keuangan 2019.

b. Nilai efisiensi anggaran Wantannas

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L:

$$NKAI=(P \times WP)+(K \times WK)+(PK \times WPK)+(NE \times WE)$$

Keterangan:

NKAI: Nilai Kinerja Aspek Implementasi

P: Pengukuran Penyerapan Anggaran

K: Pengukuran Konsistensi

PK: Pengukuran Pencapaian Keluaran

NE: Pengukuran Tingkat Efisiensi

WP: Bobot Penyerapan Anggaran

WK: Bobot Konsistensi

WPK: Bobot Pencapaian Keluaran

WE: Bobot Efisiensi

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh hasil atas nilai efisiensi anggaran Wantannas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NKAI} &= (93.54\% \times 9.7\%) + (99.3\% \times 18.2\%) + \\ &\quad (97.9\% \times 43.5\%) + (88\% \times 28.6\%) \\ &= 9.08 + 18.07 + 42.6 + 25.17 \\ &= \mathbf{94.92} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh hasil atas nilai efisiensi anggaran Setjen Wantannas adalah sebesar 94,86. Nilai efisiensi dalam suatu lembaga juga sangat penting dalam pengelolaan anggaran. Efisiensi pengelolaan anggaran sebagai cara untuk meminimalisir pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu. Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Tabel 3.6
Nilai Kinerja Aspek Implementasi Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2018	95	91.12	Sangat Baik
2019	95	98.27	Sangat Baik
2020	95	94.86	Sangat Baik

c. Persentase Penyerapan DIPA

DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan pencairan dana Negara dan pencairan

dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Pada tahun 2020, persentase penyerapan DIPA Setjen Wantannas mencapai **93.54%**.

Tabel 3.7
Persentase Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja 2020

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Belanja Pegawai	27.073.906.000	24.739.083.239	91.38
Belanja Barang	21.936.938.000	21.104.516.905	96.21
Belanja Modal	40.408.000	40.408.000	100

Tabel 3.8
Nilai Kinerja Aspek Implementasi Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi
2018	100	91.12
2019	100	98.66
2020	100	93.54

3. Terwujudnya birokrasi Setjen Wantannas yang efektif dan efisien

Birokrasi adalah tata kerja pemerintahan agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan agar sumber daya yang ada dapat dikelola semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bangsa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tercipta birokrasi yang efektif dan efisien, Setjen Wantannas mengukur dari 2 (dua) aspek, yaitu tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Wantannas dan nilai penerapan RB Setjen Wantannas.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Pengukuran kualitas akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil atau *result oriented government* serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Capaian atas birokrasi Setjen Wantannas yang efektif dan efisien diukur menggunakan 2 (dua) Indikator Sasaran Program, yaitu:

a. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Wantannas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 telah melakukan evaluasi akuntabilitas atas kinerja Setjen Wantannas dengan tujuan menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh nilai sebesar **64,58** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Setjen Wantannas sudah mulai berjalan dengan cukup baik namun sangat perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Tabel 3.9
Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun	Nilai	Predikat
2015	56.97	CC
2016	60.03	B
2017	61.24	B
2018	62.94	B
2019	64.58	B

b. Nilai penerapan RB Setjen Wantannas

Reformasi birokrasi yang dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* tentu mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Nilai penerapan RB dalam Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional. Berikut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016–2019:

Tabel 3.10
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tahun	Nilai	Predikat
2016	57.67	CC
2017	62.52	B
2018	65.17	B
2019	68.74	B

4. Tersedianya informasi yang valid, andal dan mudah diakses di Setjen Wantannas

Informasi merupakan komponen penting dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, baik organisasi privat maupun organisasi publik. Sehingga dibutuhkan informasi yang berkualitas agar keputusan yang diambil baik dan tepat guna. Indikator informasi yang berkualitas adalah informasi yang valid, andal dan mudah diakses. Informasi yang valid adalah informasi memuat ketepatan antara data yang ada di lapangan dengan data yang dilaporkan. Sedangkan informasi yang andal adalah informasi yang dapat dipercaya keabsahannya. Capaian atas informasi yang valid, andal dan mudah diakses di Setjen Wantannas diukur dengan 2 (dua) Indikator Sasaran Program, yaitu:

a. Persepsi user terhadap kemudahan akses

Persepsi user terhadap kemudahan akses merupakan indikator penting dalam suatu instansi, tanpa terkecuali Setjen Wantannas. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses informasi tersebut, maka informasi dapat disalurkan secara luas dan cepat yang nantinya akan memudahkan pihak terkait dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Ketika pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, tentu akan meningkatkan kinerja suatu instansi. Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan aksesibilitas informasi yang tersedia di lingkungan Setjen Wantannas, dilihat dari 5 variabel:

1. Kemudahan dipelajari
2. Kemudahan dalam menemukan fitur inti
3. Fleksibel dalam penggunaan fitur inti
4. Kemudahan dioperasikan
5. Tampilan jelas dan dapat dipahami

Dengan formula perhitungan kinerja, sebagai berikut:

- **Pengumpulan Data:** menggunakan form kuisisioner yang disebarakan di setiap level unit kerja pengelola data dan informasi
- **Penilaian:** hasil rekapitulasi dan pembobotan jawaban kuisisioner

b. Tingkat kematangan pengelolaan data dan informasi

Menyediakan informasi yang valid, andal, dan mudah diakses di Setjen Wantannas adalah tingkat kematangan pengelolaan data dan informasi. Pada era digital seperti saat ini, memiliki integrasi antar unit atau kebiroan atau kedeputian sangat penting untuk kelancaran dalam penyelesaian suatu pekerjaan untuk meningkatkan kualitas dalam rangka tercapainya tujuan dan visi misi Setjen Wantannas. Hal ini karena, suatu unit tidak bisa berdiri sendiri melainkan adanya keterkaitan antar unit dalam suatu instansi. Apabila terjadi *trouble* dalam pengelolaan data dalam suatu unit instansi, maka pekerjaan dalam instansi yang bersangkutan juga akan terganggu atau tertunda. Inilah yang dimaksud dengan rantai data dan informasi.

Diukur berdasarkan Maturity Model Teknologi Informasi yang terdiri dari 6 tingkat:

- Tingkat 0 (*non-existent*): Kekurangan menyeluruh terhadap proses apapun. Organisasi tidak mengetahui terdapat permasalahan yang harus diatasi.
- Tingkat 1 (*initial/ad hoc*): Organisasi mengetahui terdapat masalah. Namun tidak terdapat proses terstandarisasi, hanya menggunakan pendekatan ad hoc yang memperlakukan masalah secara individu atau per kasus.
- Tingkat 2 (*repeatable but intuitive*): Standardisasi proses sudah dikembangkan namun tidak seluruhnya terdokumentasi, dan tidak seluruhnya disosialisasikan kepada pelaksana.
- Tingkat 3 (*defined process*): Prosedur telah distandardisasikan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan melalui pelatihan. Namun prosedur dikembangkan tanpa ada pengawasan, memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan.
- Tingkat 4 (*managed and measurable*): Manajemen memiliki sejumlah indikator atau ukuran kepatuhan dalam prosedur yang sudah berjalan. Dapat mengambil tindakan jika terdapat proses yang diindikasikan tidak efektif.
- Tingkat 5 (*optimised*): Tata kelola manajemen teknologi informasi telah mengacu pada praktik terbaik. Teknologi informasi telah digunakan sebagai perangkat bantu otomatis untuk mendukung *workflow*, menambah efisiensi dan kualitas kerja, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan.

Dengan formula perhitungan kinerja, sebagai berikut:

- **Pengumpulan Data:** menggunakan form kuisisioner yang disebar di setiap level unit kerja pengelola data dan informasi
- **Penilaian:** hasil rekapitulasi dan pembobotan jawaban kuisisioner

Pada tahun 2020, Setjen Wantannas belum melaksanakan survei mengenai persepsi user terhadap kemudahan akses dan tingkat kematangan pengelolaan data dan informasi. Sehingga target atas sasaran program tersedianya informasi yang valid, andal dan mudah diakses di Setjen Wantannas belum tercapai.

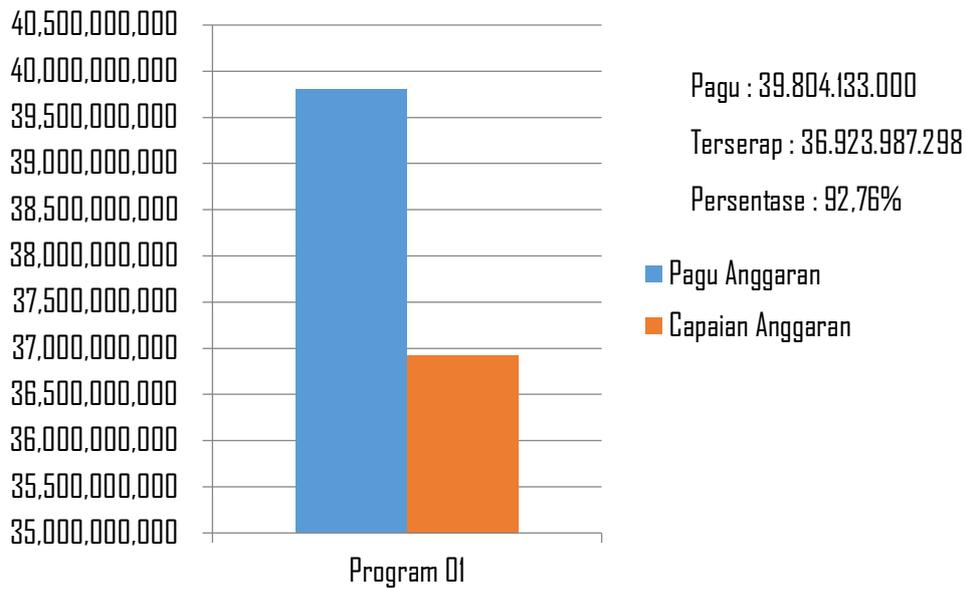
Adapun penyebab kegagalan atas sasaran strategis mengenai terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien, yaitu:

1. Persentase penyerapan DIPA yang tidak maksimal atau tidak mencapai target tahunan; dan
2. Belum dilaksanakannya penilaian atas persepsi pengguna terhadap kemudahan akses dan tingkat kematangan pengelolaan data dan informasi.

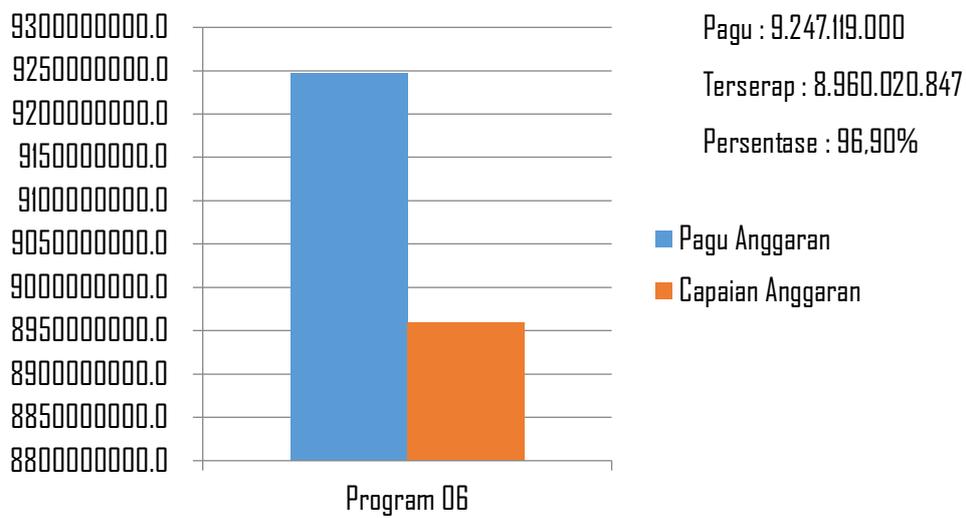
B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Setjen Wantannas tahun 2020 sebesar **Rp. 49.051.252.000,00**. Pagu tersebut pada tahun 2020 terserap sebesar **Rp.45.884.008.145,00**. Adapun realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) program, dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 3.1
 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya



Grafik 3.2
 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional



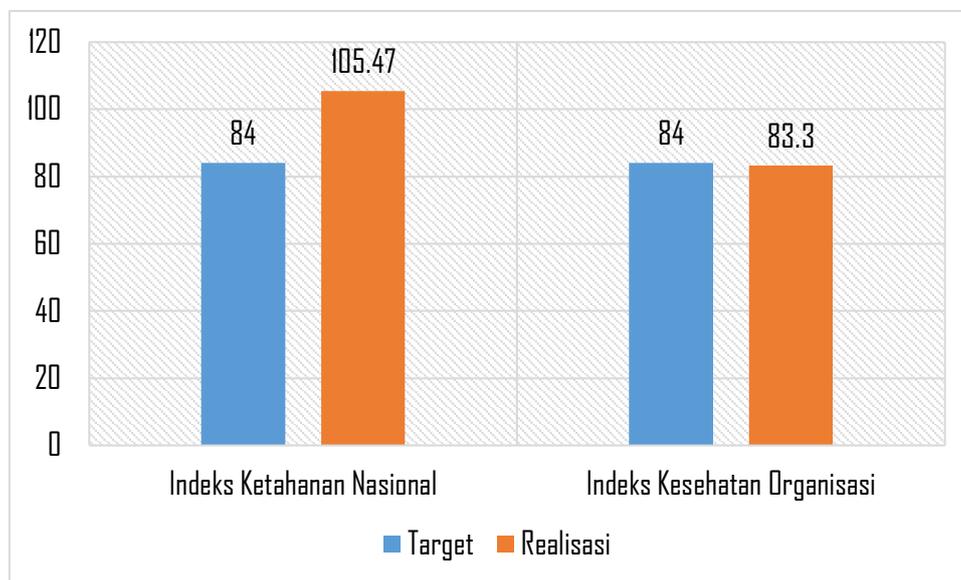
BAB IV

PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Ketahanan Nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dalam mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Setjen Wantannas yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada Presiden RI dan masyarakat (publik).

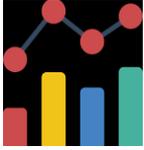
Sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi Setjen Wantannas yang telah ditetapkan, dan berdasarkan penetapan kinerja tahun 2020 telah terealisasi pencapaiannya dengan hasil sebagai berikut:

Grafik 4.1
Capaian Sasaran Strategis Setjen Wantannas



PERMASALAHAN

- Penyelenggaraan atas program dan kegiatan di Setjen Wantannas terhambat adanya pandemi covid-19, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan ada yang dibatalkan dan ada yang terlaksana (di triwulan IV 2020);
- Saran tindak kebijakan yang dihasilkan Setjen Wantannas yang dikirim kepada Presiden perlu ditingkatkan;
- Restrukturisasi Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- Belum optimalnya nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja.



PERBAIKAN ke DEPAN

- Setjen Wantannas melakukan pergeseran pagu anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- Setjen Wantannas melakukan penyesuaian pagu belanja pada anggaran yang bersumber dari rupiah murni, antara lain : Belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional, serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya pandemi covid-19 atau dapat ditunda untuk tahun berikutnya;
- Setjen Wantannas melakukan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan wabah covid-19, antara lain : Pengadaan sanitizer, masker dan bahan lain pencegah covid-19 yang digunakan untuk kebutuhan internal Wantannas dalam jumlah dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Peningkatan dan percepatan atas kajian yang dihasilkan oleh Setjen Wantannas yang dikirim ke Presiden RI dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- Mempercepat proses restrukturisasi Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang berguna untuk peningkatan capaian kinerja Setjen Wantannas; dan
- Melakukan peningkatan sumber daya di Setjen Wantannas guna mengoptimalkan nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2020, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Republik Indonesia.

Jakarta, Februari 2021
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.
Laksamana Madya TNI

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2020

Jakarta, Februari 2020



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laksdya TNI Achmad Djamaludin
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Februari 2020

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsma TNI Benedictus Benny K., S.H., M.AvMgt., MAIR
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan Setjen
Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Laksdya TNI Achmad Djamaludin
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Benedictus Benny K., S.H., M.AvMgt., MAIR
Marsekal Pertama TNI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : **Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan**
 Tahun Anggaran : **2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien	Persentase unit kerja yang mengajukan perencanaan kegiatan tahunan secara tepat waktu	100	Persen
		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	100	Persen
		Terselenggaranya Layanan Perencanaan	1	Layanan
2	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi dan tata laksana Setjen Wantannas yang efektif dan efisien	Persentase dokumen organisasi dan tatalaksana yang diselesaikan tepat waktu	100	Persen
		Persentase program dan kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai road map RB per tahun	100	Persen
		Terselenggaranya Layanan Manajemen Organisasi	1	Layanan
		Terselenggaranya Layanan Reformasi Birokrasi	1	Layanan
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase unit kerja yang menyampaikan laporan pelaksanaan program dan anggaran secara tepat waktu	100	Persen
		Persentase tagihan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	100	Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang dapat diselesaikan tepat waktu	100	Persen
		Terselenggaranya Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan
4	Meningkatnya kualitas tata kelola belanja pegawai yang efektif dan efisien	Jumlah layanan pengelolaan belanja pegawai	12	Bulan
		Persentase layanan pengelolaan belanja pegawai yang tepat waktu	100	Persen
		Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1	Layanan

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan :

Rp. 25.279.438.000,-

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,




Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Benedictus Benny K., S.H., M.AvMgt., MAIR
Marsekal Pertama TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laksma TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han)
Jabatan : Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal
Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Laksdya TNI Achmad Djamaludin
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Jakarta, Februari 2020

Pihak Pertama,

Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han)
Laksamana Pertama TNI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : **Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal**

Tahun Anggaran : **2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya pengelolaan persidangan dan kehumasan Setjen Wantannas yang efisien	Persentase pengelolaan dan penatausahaan layanan persidangan yang efektif dan efisien	100	Persen
		Persentase pengelolaan produksi dan reproduksi bahan atau materi hasil sidang	100	Persen
		Persentase pengelolaan dan penatausahaan layanan kehumasan yang efektif dan efisien	100	Persen
		Persentase publikasi dan pemberitaan tentang kegiatan Setjen Wantannas	100	Persen
		Jumlah naskah MoU dengan K/L terkait	7	Naskah
		Jumlah Pertemuan Bakohumas yang terlaksana	1	Kegiatan
		Terselenggaranya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan
2	Terselenggaranya tata kelola Sistem Informasi Setjen Wantannas yang aman dan mutakhir	Persentase dokumen publik yang diupload di website Setjen Wantannas	100	Persen
		Jumlah pengunjung bulanan website Setjen Wantannas	1000	Orang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase penggunaan aplikasi Sisfo Setjen Wantannas	80	Persen
		Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi	1	Layanan
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Setjen Wantannas yang efektif dan efisien	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen Wantannas	80	Persen
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup Setjen Wantannas per tahun	8	Kali
		Persentase jumlah rekomendasi hasil Pengawasan RB manajerial yang ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja Setjen Wantannas	75	Persen
		Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas Setjen Wantannas	66	Persen
		Terselenggaranya Layanan Audit Internal	1	Layanan

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan pengawasan: Rp 757.210.000,-

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,




Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han)
Laksamana Pertama TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.

Jabatan : Kepala Biro Umum Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Laksdya TNI Achmad Djamaludin

Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon II : **Biro Umum**
Tahun Anggaran : **2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya pengelolaan BMN Setjen Wantannas yang optimal	Persentase BMN dalam kondisi baik dan layak pakai	100	Persen
		Persentase laporan BMN yang transparan dan akuntabel yang dapat diselesaikan tepat waktu	100	Persen
		Terselenggaranya Layanan Manajemen Barang Milik Negara (BMN)	1	Layanan
2	Terwujudnya layanan pengadaan Setjen Wantannas yang optimal	Persentase layanan pengadaan kebutuhan perkantoran yang dilaksanakan tepat waktu	100	Persen
3	Terwujudnya tata kelola perkantoran Setjen Wantannas yang efisien	Persentase dokumen administrasi persuratan dan ekspedisi yang dapat diselesaikan tepat waktu	100	Persen
		Persentase layanan keprotokoleraan dan kesekretariatan yang optimal	100	Persen
		Persentase layanan manajemen arsip yang dikelola sesuai dengan standar Pengelolaan Arsip dan Jadwal Retensi Arsip	60	Persen
		Jumlah layanan tata usaha pimpinan	12	Bulan Layanan
		Terselenggaranya Layanan Protokoler	1	Layanan
		Terselenggaranya Layanan Umum	1	Layanan
		Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1	Layanan
4	Terwujudnya tata kelola	Persentase layanan Manajemen SDM	100	Persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SDM Setjen Wantannas yang efisien	yang optimal dan tepat waktu		
		Persentase data personil yang mutakhir dan valid	100	Persen
		Jumlah laporan layanan hukum kepegawaian	12	Bulan Layanan
		Persentase layanan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dengan optimal	100	Persen
		Terselenggaranya Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	1	Layanan

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Pengelolaan Internal Perkantoran: Rp 11.002.063.000,-

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI



Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP., M.M.
Jabatan : Deputi Sistem Nasional Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Laksdya TNI Achmad Djamaludin
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Toto Siswanto, S.IP., M.M.
Mayor Jenderal TNI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputian Sistem Nasional**
 Tahun Anggaran : **2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kehandalan saran tindak kebijakan dan strategi nasional (kajian dinamis, perkiraan cepat, semiloka, dan kajilu) bidang sistem nasional	Persentase saran tindak kebijakan dan strategi nasional (kajian dinamis, perkiraan cepat, semiloka, dan kajilu) sesuai dengan standard waktu yang ditetapkan	84	Persen
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Sistem Nasional Bidang Lingkungan Alam	4	Naskah
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Sistem Nasional Bidang Lingkungan Sosial	4	Naskah
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Sistem Nasional Bidang Lingkungan Pemerintah Negara	4	Naskah
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Sistem Nasional Bidang Informasi dan Pengolah Data	4	Naskah
2	Meningkatnya validitas dan kehandalan kebijakan dan strategi bidang sistem	Tingkat validitas dan kehandalan saran tindak (skala	100	Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	nasional	1-100		
3	Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi	Terumuskannya rancangan kebijakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi serta pembinaan kompetensi penyelenggara pembinaan bela negara	100	Persen

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Sistem Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional:

Rp 2.300.000.000,-

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI



Toto Siswanto, S.IP., M.M.
Mayor Jenderal TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H.
Jabatan : Deputi Politik dan Strategi Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Laksdya TNI Achmad Djamiludin
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Achmad Djamiludin
Laksamana Madya TNI

Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H.
Inspektur Jenderal Polisi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputian Politik dan Strategi**
 Tahun Anggaran : **2020**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kehandalan perumusan isu strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional bidang politik dan strategi	Persentase kajian siklus pembinaan ketahanan nasional sesuai dengan standard waktu yang ditetapkan	84	Persen
2	Meningkatnya kehandalan saran tindak kebijakan dan strategi nasional (kajian dinamis, perkiraan cepat, semiloka, dan kajilu) bidang politik dan strategi	Persentase saran tindak kebijakan dan strategi nasional (kajian dinamis, perkiraan cepat, semiloka, dan kajilu) sesuai dengan standard waktu yang ditetapkan	84	Persen
		Jumlah Rekomendasi saran Tindak Kebijakan Politik Dan Strategi Bidang Politik Nasional	5	Naskah
		Jumlah Rekomendasi saran Tindak Kebijakan Politik Dan Strategi Bidang Strategi Nasional	5	Naskah
		Jumlah Rekomendasi saran Tindak Kebijakan Politik Dan Strategi Bidang Rencana Kontinjensi	6	Naskah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatnya validitas dan kehandalan kebijakan dan strategi bidang politik dan strategi	Tingkat validitas dan kehandalan saran tindak (skala 1-100)	100	Persen
4	Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi	Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi	100	Persen

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi dalam rangka Ketahanan Nasional: 2.200.000.000,-

Pihak Kedua,



Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Jakarta, Februari 2020

Pihak Pertama,



Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H.
Inspektur Jenderal Polisi



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laksda TNI Dr. Dani Achdani, S.Sos., S.E., M.AP.
Jabatan : Deputi Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Laksdya TNI Achmad Djamaludin
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Dr. Dani Achdani, S.Sos., S.E., M.AP.
Laksamana Muda TNI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan**
 Tahun Anggaran : **2020**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kehandalan perumusan isu strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional bidang pengkajian dan penginderaan	Persentase kajian siklus pembinaan ketahanan nasional sesuai dengan standard waktu yang ditetapkan	84	Persen
2	Meningkatnya kehandalan saran tindak kebijakan dan strategi nasional (kajian dinamis, perkiraan cepat, semiloka, dan kajilu) bidang pengkajian dan penginderaan	Persentase saran tindak kebijakan dan strategi nasional (kajian dinamis, perkiraan cepat, semiloka, dan kajilu) sesuai dengan standard waktu yang ditetapkan	84	Persen
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Penginderaan Dan Perkiraan Ancaman Bidang Lingkungan Strategis Nasional	5	Naskah
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Penginderaan Dan Perkiraan Ancaman Bidang Lingkungan Strategis Regional	5	Naskah
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Penginderaan Dan	5	Naskah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Perkiraan Ancaman Bidang Lingkungan Strategis Internasional		
3	Meningkatnya validitas dan kehandalan kebijakan dan strategi bidang pengkajian dan penginderaan	Tingkat validitas dan kehandalan saran tindak (skala 1-100)	100	Persen
4	Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi	Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi	100	Persen

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengkajian dan Penginderaan: Rp 2.200.000.000,-

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI



Dr. Dani Achdani, S.Sos., S.E., M.AP.
Laksamana Muda TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si.
Jabatan : Deputi Pengembangan Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Laksdya TNI Achmad Djamaludin
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2020

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Deputi Pengembangan
Setjen Wantannas

Dr. Sungkono, S.E., M.Si.
Marsekal Muda TNI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputian Pengembangan**
Tahun Anggaran : **2020**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kehandalan saran tindak kebijakan dan strategi nasional (kajian dinamis, perkiraan cepat, semiloka, dan kajilu) bidang pengembangan	Persentase saran tindak kebijakan dan strategi nasional (kajian dinamis, perkiraan cepat, semiloka, dan kajilu) sesuai dengan standard waktu yang ditetapkan	84	Persen
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Evaluasi Implementasi Dan Risiko Pembangunan Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan	5	Naskah
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Evaluasi Implementasi Dan Risiko Pembangunan Bidang Ekonomi	5	Naskah
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Evaluasi Implementasi Dan Risiko Pembangunan Bidang Sosial Budaya	5	Naskah
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Evaluasi Implementasi Dan Risiko Pembangunan Bidang	5	Naskah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pertahanan Keamanan		
2	Meningkatnya validitas dan kehandalan kebijakan dan strategi bidang pengembangan	Tingkat validitas dan kehandalan saran tindak (skala 1-100)	100	Persen
3	Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi	Terumuskannya rancangan kebijakan evaluasi dan pengembangan pembinaan bela negara	100	Persen

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan:
Rp 2.400.000.000,-

Jakarta, Februari 2020

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional



Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Deputi Pengembangan
Setjen Wantannas



Dr. Sungkono, S.E., M.Si.
Marsekal Muda TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka
Jabatan : Staf Ahli Bidang Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Laksdya TNI Achmad Djamaludin
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2020

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Staf Ahli Bidang Ekonomi
Setjen Wantannas

Moh. Hatta Usmar Rukka
Mayor Jenderal TNI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon I : **Staf Ahli**
 Tahun Anggaran : **2020**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kehandalan saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait keahlian tertentu	Persentase saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait keahlian tertentu sesuai dengan standard waktu yang ditetapkan	84	Persen
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu Bidang Hukum	1	Naskah
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu Bidang Ekonomi	1	Naskah
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu Bidang Sosial budaya	1	Naskah
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu Bidang Iptek	1	Naskah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu Bidang Pertahanan Keamanan	2	Naskah
		Jumlah Koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Bela Negara	1	Aksi

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Perumusan Saran Tindak Jakstranas Terkait Keahlian Tertentu:
Rp. 730.484.000,-

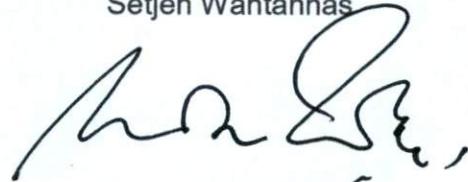
Jakarta, Februari 2020

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional



Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

Staf Ahli Bidang Ekonomi
Setjen Wantannas



Moh. Hatta Usmar Rukka
Mayor Jenderal TNI